Upah Dalam Perspektif Islam

Salwa Izzatul Ulya

Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Quran, Bogor

e-mail: izzatul971@gmail.com

Rachmat Risky Kurniawan, SEI, MM

Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Quran, Bogor

Email: rah.rizqy@gmail.com

Abstract: *The study was intended to revolutionize the laws and conditions of wages in the Islamic Economy, the methods to be used in this study are the methods of tafsir maudhu'i (thematic) and tafsir tahlili (analytic). The results of this study show how The Islamic Economy perspective of assassins or wages based on at-Talaq verse 6, al-Baqarah verse 233 and al-Qashash verse 26.*

Keywords : *Wages, Islamic Economy*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum dan ketentuan *upah* dalam perspektif Ekonomi Islam. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir *maudhu'i* (tematik) dan tafsir *tahlili* (analitik). Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana perspektif Ekonomi Islam tentang pengupahan atau pemberian *upah* berdasarkan surat at-Talaq ayat 6, surat al-Baqarah ayat 233 dan al-Qashash ayat 26.

Kata kunci : Upah, Ekonomi Islam

Pendahuluan

Pengupahan atau pemberian *upah* adalah salah satu masalah yang tidak pernah selesai diperdebatkan berbagai pihak, apapun bentuk organisasinya baik itu swasta maupun pemerintah. Seolah-olah *pangupahan* merupakan pekerjaan yang selalu membuat pihak manajemen berpikir berulang-ulang untuk menetapkan kebijakan tersebut. Islam telah memberikan jawaban atas seluruh permasalahan manusia, termasuk perekonomian. Pada dasarnya, hubungan antara pengusaha dan buruh di zaman modern ini telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah saw. dan para sahabat. *Upah* atau *Ijarah* dalam bahasa Arab di dalam Islam sangat berhubungan dengan konsep materi dan etika moral, berbeda dengan ekonomi konvensional. Konsep *upah* dalam Islam sangat berbeda dengan konsep *upah* barat. Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan moral dalam sistem pengupahan, seperti konsep keadilan dan kelayakan¹.

Pembahasan yang akan dibahas disini adalah mengenai pengupahan atau pemberian *upah* dalam perspektif Ekonomi Islam. Dalam Islam *upah* biasa disebut sebagai *Ijarah* yang berarti *upah* mengupah adalah menukar sesuatu dengan imbalannya, diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia yang berarti sewa-menyewa dan *upah* mengupah. Anjuran untuk segera membayar *upah* tercantum dalam hadist Rasulullah saw. yang menganjurkan untuk membayar *upah* pekerja sebelum kering keringatnya, yang dimaksudkan untuk membayar *upah* para pekerja tepat pada waktunya.²

¹ Fauzi Caniago, "Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam", <https://media.neliti.com>

² Syndyatul Mulyadi, "Analisis Sistem Pengupahan dalam Perspektif Ekonomi Islam", <https://jimfeb.ub.ac.id>

Pengertian *Upah* dalam Ekonomi Islam

Upah dalam Bahasa Arab disebut *al-ujrah*. *Ijarah* diambil dari kata “*al-ajr*”, yang artinya ialah *al-iwadh* (imbalan), dari pengertian ini pahala (*twasab*) dinamakan “*ajr*” (*upah* atau pahala). Sedangkan secara istilah *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran *upah* atau *ujrah*, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Upah dalam Islam biasa disebut sebagai *ijarah*. Menurut istilah *fiqih ijarah* berarti pemberian dari hak pemanfaatan dengan syarat adanya imbalan. Sedangkan menurut istilah ialah akad untuk mendapatkan manfaat dengan pembayaran. Kata *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang dalam bahasa disebut *al-iwadh* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai ganti dan *upah*. Dari definisi beberapa ulama, *ijarah* dapat dipahami sebagai menukar sesuatu dengan adanya imbalan, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan sewa-menyewa dan *upah* mengupah. Dimana sewa-menyewa (*baiu' manafi'*) yang berarti menjual manfaat dan *upah* mengupah (*baiu' khuwwaati*) yang berarti menjual tenaga atau kekuatan. *Upah* dibagi dalam dua bentuk, yaitu :

Pertama, *Ajrun Musammá*, yaitu *upah* yang telah disebutkan dalam perjanjian dan dipersyaratkan, ketika disebutkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak dengan *upah* yang telah ditetapkan dan tidak ada unsur paksaan.

Kedua, *Ajrun Mitsli*, yaitu *upah* yang sepadan dengan kerjanya dan sepadan dengan kondisi pekerjaannya baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaannya saja.³

Sedangkan menurut KBBI definisi *upah* adalah uang, gaji atau imbalan yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Menurut istilah para ulama' berbeda-beda dalam mendefinisikan *Ijarah*.

Menurut *Asy-Syafi'iyah*, *Ijarah* ialah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima-menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *Ijarah* ialah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

Menurut Idris Ahmad, *upah* artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.⁴

Upah dalam perspektif Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip *upah* perspektif ekonomi Islam yang pada hakikatnya untuk menciptakan keadilan ekonomi bagi seluruh umat kaitannya dengan majikan dan tenaga kerja yang memiliki hubungan kerja. Prinsip adil di dalam Islam tentunya menjamin bahwa *upah* yang diterima oleh tenaga kerja harus layak dan sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh tenaga kerja itu sendiri terhadap perusahaan dalam menjalin kerjasama. Maka, harus dibayar secara adil tidak terlalu rendah sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok tenaga kerjanya dan *upah* juga tidak boleh dibayarkan terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan bagian yang sesungguhnya dari hasil kerja sama tersebut. *Upah* yang dibayarkan kepada para pekerja berbeda-beda jumlahnya

³ Syndiyatul Mulyadi, *Analisis Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ilmiah.

⁴ Muchlisin Riadi, *Ijarah*, <https://www.kajianpustaka.com>

harus berdasarkan tanggung jawab dan jenis pekerjaan yang dipikulnya. *Upah* seharusnya diberikan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Jika tingkat hidup masyarakat meningkat maka seharusnya tingkat *upah* yang diperoleh juga harus ditingkatkan sehingga para pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu juga dalam Islam penetapan *upah* juga harus berdasarkan nilai kerja orang itu sendiri dimana setiap orang memiliki keahlian dan ketekunan yang berbeda-beda.

Prinsip adil di dalam Islam tentunya menjamin bahwa *upah* yang diterima oleh tenaga kerja harus layak dan sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh tenaga kerja itu sendiri terhadap perusahaan dalam menjalin kerjasama. Maka, harus dibayar secara adil tidak terlalu rendah sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok tenaga kerjanya dan *upah* juga tidak boleh dibayarkan terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan bagian yang sesungguhnya dari hasil kerja sama tersebut.

Pemberian *upah* tersebut sesuai dengan bagian kerja setiap pekerja. Konsep kedua adalah kelayakan *upah* yang diterima oleh pekerja harus dilihat dari tiga aspek, yaitu papan, pangan dan sandang. Artinya hubungan antara majikan dengan pekerja bukan hanya sebatas hubungan formal, tetapi pekerja sudah dianggap sebagai keluarga majikan. Konsep inilah yang membedakan antara konsep *upah* menurut ekonomi barat dengan konsep *upah* menurut ekonomi Islam.⁵

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah *upah* dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak. *Upah* ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.⁶

Upah yang wajar atau dalam artian tidak seorang pun yang dirugikan adalah apa yang dibutuhkan oleh seorang pekerja, yaitu biaya hidup dengan batas minimum. Penentuan *upah* tidak boleh didasarkan perkiraan batas taraf hidup yang paling rendah atau tingginya tarif tertentu. Menetapkan *upah* yang adil bagi pekerja sesuai dengan syari'ah bukanlah pekerjaan mudah. Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* berpendapat, dasar penetapan *upah* pekerja adalah standar yang cukup artinya gaji atau *upah* pekerja dapat menutupi kebutuhan minimum.⁷

Prinsip *Upah* dalam Ekonomi Islam

Adil menurut Islam merupakan norma paling utama dalam keseluruhan aspek perekonomian. Seperti dalam pemberian imbalan jasa kepada para pekerja harus bersifat adil. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik.

Semua sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan sistem perekonomian yang adil. Namun, tidak semua sistem tersebut mampu dan secara konsisten menciptakan sistem yang adil. Tanpa keadilan manusia terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi permusuhan antara manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih dari pada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.⁸

⁵ Syndiyatul Mulyadi, *Analisis Sistem PengUpahan Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ilmiah.

⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, 363.

⁷ Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam*, Yogyakarta: Magistra Insani Press, 55.

⁸ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 35-43.

Jadi, dalam pandangan ekonomi Islam pengusaha harus membayar *upah* para pekerja dengan bagian yang sesuai dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian (tentang *upah*) antara majikan dan bekerja harus bersikap jujur dan adil dalam setiap urusannya. Apabila majikan memberi *upah* secara tidak adil, maka dia dianggap telah menganiaya pekerjanya. Dalam memberikan *upah*, pengusaha atau majikan harus mempertimbangkan *upah* pekerjanya secara tepat tanpa harus menindas pihak manapun, baik dirinya sendiri maupun pihak pekerja.⁹

Tujuan dasar dari *upah* yang adil (sepadan) adalah untuk melindungi kepentingan pekerja dan majikan serta melindungi mereka dari saling mengeksploitasi dalam transaksi bisnis.¹⁰ Maksudnya, majikan tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya sebagai pemilik usaha/perusahaan untuk memperkerjakan pekerja tanpa mengenal waktu. Sebagaimana disebutkan didalam hadits, Rasulullah bersabda:

عن عبد الله ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يخيف عرقه. Artinya: Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda, “Berilah *upah* kepada para pekerja sebelum keringatnya kering.”

Upah yang layak ditunjukkan dengan pembuatan undang-undang *upah* minimum di sebagian besar Negara Islam. Namun, terkadang *upah* minimum tersebut sangat rendah, hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokok saja. Namun rupanya setiap pemerintah Negara Islam merasa bahwa paling tidak mereka harus mendukung gagasan *upah* minimum tersebut mengingat suasana moral yang berlaku.¹¹

Agar dapat menetapkan suatu tingkatan *upah* yang cukup Negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat *upah* minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat *upah* tersebut tidak akan jatuh.¹²

Untuk mempertahankan suatu standar *upah* yang sesuai, Islam telah memberikan kebebasan sepenuhnya atas mobilisasi tenaga kerja. Disamping itu, memberi kebebasan sepenuhnya kepada pekerja untuk memilih jenis pekerjaan yang dikehendaknya. Demi kemakmuran dan kemajuan Negara, maka perlu untuk menyusun kembali sistem *upah* sesuai dengan ajaran Rasulullah untuk menentukan *upah* minimum.¹³

Sudah menjadi kewajiban majikan untuk menentukan *upah* minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkatan kehidupan yang layak.¹⁴

Hukum Ijarah atau Upah dalam Ekonomi Islam

Untuk hukum *ijarah* atau sewa-menyewa ini adalah *mubah* atau diperbolehkan syara'. Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *Ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Selain bermanfaat bagi sesama manusia sebagian masyarakat sangat membutuhkan akad ini, karena termasuk salah satu akad tolong-menolong. Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah

⁹ Dewi Lestari, *Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, Skripsi Prodi Ekonomi Islam UIN Walisongo, Semarang, 2015, 36.

¹⁰ M. Ghufroon, “Politik Negara dalam Pengupahan Buruh di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 124.

¹¹ Salim, *Bisnis...*, 107.

¹² Rahman, *Economic...*, 365.

¹³ Wuryanti Koentjoro, *Upah Dalam Perspektif Islam*, Jurnal, Fakultas Ekonomi Unissula, Semarang, 2011.

¹⁴ Dewi Lestari, *Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, Skripsi Prodi Ekonomi Islam UIN Walisongo, Semarang, 2015, 342.

sepakat akan legitimasi ijarah. Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* itu disyariatkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan. Namun ada beberapa ulama yang memiliki perbedaan pendapat yakni Abu Bakar Al-Asham, Isma'il bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan.¹⁵

Para ulama tersebut tidak memperbolehkan ijarah karena ijarah merupakan jual beli manfaat tidak bisa diserahterimakan ketika akad terjadi. Manfaat hanya bisa dirasakan ketika sudah beberapa waktu. Namun tanggapan tersebut disanggah oleh Ibnu Rush, meskipun manfaat belum ada ketika akad dilakukan, namun pada nantinya manfaat akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian dan pertimbangan syara'.

Adapun dasar hukum diperbolehkannya Ijarah terdapat dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فُتْرَضَّعْ لَهُ أُخْرَىٰ

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka Upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (QS. At-Talaq ayat 6)

Dalam kalimat "فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ" yang berarti "jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka Upahnya". Ayat ini menjadi perumpamaan tentang hukum *Ijarah*.

Prof. Dr. Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam kitab Al-Munir bahwa, apabila setelah itu para istri yang kalian talak menyusui anak-anak kalian yang mereka lahirkan, berilah mereka *upah* menyusui jika mereka setuju dengan *ujrah mitsl* (*upah* standar). Saling memerintah, menyuruh, meminta, dan bermusyawarahlah kalian wahai para suami dan istri yang terjadi perceraian dan talak di antara kalian, dengan baik, patut, dan benar menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan anak dengan dilatarbelakangi oleh semangat menjaga kemaslahatan anak kondisi kesehatan, dan penghidupannya, tanpa menimpakan mudharat, tanpa saling memberatkan dan mempersulit, sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat, "Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya." (al-Baqarah: 233) "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut." (al-Baqarah: 233) Ayat ini menjadi dalil yang menunjukkan bahwa biaya *upah* menyusui bagi anak-anak adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab para suami, sedangkan hak perawatan adalah menjadi tanggung jawab para istri.¹⁶

Dalam kitab Al-Qurthubi dijelaskan bahwa wanita-wanita yang telah dicerai itu menyusukan anak-anakmu dari mereka, maka para ayah wajib memberi mereka *upah*

¹⁵ Hukum Ijarah: Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, Rukun, Jenis dan Ketentuannya, <https://www.seputarpengetahuan.co.id/>

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, Kitab Tafsir Al-Munir, jilid 14, 60.

menyusukan itu. Dalam hal ini, seorang suami berhak menyewa istrinya untuk menyusui anaknya, sebagaimana dia pun boleh menyewa wanita lain untuk itu.¹⁷

Dalam kitab Ath-Thabari dijelaskan bahwa maksudnya adalah jika para istri kalian yang telah kalian cerai dengan thalak ba'in itu menyusukan anak kalian dengan upahnya maka berikan upahnya kepada mereka. . Bisyr menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatada tentang firman Allah: "فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْزُقُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ" yang berarti "jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya", ia berkata "Dialah yang lebih berhak upah atas penyusuan anaknya, sebagaimana anak itu disusui orang lain."¹⁸

Dalam kitab Ibnu Katsir dijelaskan bahwa jika istrinya itu menyusui anaknya, maka dia berhak mendapatkan balasan yang setimpal, dan dia juga berhak untuk mengikat perjanjian melalui ayahnya atau walinya mengenai upah yang diberikan.¹⁹

وَاتَّقُوا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Baqarah ayat 233).

Dalam kitab Al-Qurthubi dijelaskan bahwa firman Allah swt. إِذَا سَلَّمْتُمْ "Apabila kamu memberikan", maksud kamu di sini adalah para ayah. Artinya, kalian serahkan upah kepada perempuan yang mau menyusui anak orang lain. Demikian yang dikatakan oleh Sufyan. Mujahid berkata, "Artinya, kalian serahkan kepada para ibu upah mereka, senilai biaya yang telat mereka keluarkan selama menyusui sampai waktu hendak menyusukan anak kepada perempuan lain."²⁰

Dalam kitab Ath-Thabari dijelskan bahwa sebagian ahli mengatakan: maknanya: jika kamu memberikan upah kepada ibunya atas penyapihan tersebut ketika kamu mengambilnya darinya, atau dengan upah yang sepadan terhadap habisnya air susu ibunya, atau keadaan di mana bapaknya udzur mencarikan ibu susuan untuk anaknya kepada orang lain untuk menyapihnya. Berdasarkan riwayat sebagai berikut:

Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid: إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ "apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut" yaitu: upah sesuai penyapihan anaknya.²¹

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

"Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, 'Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya'." (QS. Al-Qashash ayat 26)

¹⁷ Muhammad Ibrahim Al-Hifwani, *Kitab Tafsir Al-Qurthubi*, jilid 18, 677.

¹⁸ Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Kitab Tafsir Ath-Thabari*, jilid 25, 191.

¹⁹ Ismail Ibnu Katsir, *Kitab Tafsir Ibnu Katsir*, jilid , 219

²⁰ Muhammad Ibrahim Al-Hifwani, *Kitab Tafsir Al-Qurthubi*, jilid 3, 368.

²¹ Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Kitab Tafsir Ath-Thabari*, jilid 4, 54-55.

Dalam kitab Al-Qurthubi dijelaskan bahwa ayat ini merupakan dalil bahwa akad menerima *upah* keaja telah dikenal pada zaman itu. Demikian pula halnya dalam setiap agana dijelaskan tentang akad menerima dan memberi *upah* kerja. Sebab, akad tersebut sudah merupakan bagian dari kebutuhan pribadi manusia dan dalam kaitannya dengan sesama masyarakatnya.²²

Dalam kitab Al-Munir dijelaskan bahwa anak perempuan Nabi Syu'aib meminta kepada ayahnya agar mempekerjakan orang yang kuat lagi terpercaya. Salah seorang dari dua putri orang tua itu, yang pergi mengundang Musa berkata, "Wahai bapakku, *upah* lah dia untuk menggembala kambing-kambing ini. Sungguh, sebaik-baik orang yang diberi *upah* adalah dia, sebab dia orang yang kuat untuk menjaga ternak dan melakukan urusan peternakan. Dia juga orang yang terpercaya yang mana engkau tidak khawatir dikhianati"

Perempuan itu menyifati Musa dengan sifat buruh yang paling utama: kuat melaksanakan perintah dan amamah dalam menjaga sesuatu. Sumber dari dua sifat ini adalah yang dia saksikan dari keadaan Musa. Bapaknya berkata, "Bagaimana kamu tahu tentang itu?" Perempuan itu menjawab, "Dia mengangkat batu besar yang tidak bisa dibawa kecuali oleh sepuluh orang. Dan aku ketika datang bersamanya, aku ada di depannya, Lalu dia berkata kepadaku, "Kamu di belakangku. Jika jalanku salah, lemparkanlah kerikil supaya aku tahu jalan yang aku tuju."

Abdullah bin Mas'ud mengatakan orang yang paling bagus firasatnya ada tiga. Abu Bakar ketika befirasat memberi kekuasaan kepada Uman orang dalam cerita Nabi Yusuf ketika berkata, "Muliakanlah kedudukannya" dan perempuan dalam kisah Musa ketika berkata, "Wahai Bapakku, ambillah dia sebagai orang yang bekerja kepada kita. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."²³

Syarat *Upah* dalam Ekonomi Islam

Terdapat pula rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Mu'jir* dan *Musta'jir* (orang yang melakukan akad sewa-menyewa dan *upah-mengupah*). Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan *upah* atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima *upah* untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi yang berakad *ijarah* di syaratkan mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akad menjadi tidak sah.
- b. *Shigot* yaitu adanya *ijab* dan *qabul* antara *Mu'jir* dan *Musta'jir*. *Sighot* akad adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah. Dalam Hukum Perikatan Islam, *ijab* diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *qobul*

²² Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, *Kitab Tafsir Al-Qurthubi*, jilid 13, 692.

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Kitab Tafsir Al-Munir*, jilid 10, 286.

adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijab*. Syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab-qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

- c. Adanya *ujrah* yang disyaratkan ujrahnya harus diketahui oleh kedua belah pihak. *Ujroh* adalah sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Adapun syarat *ujroh* atau *upah* yaitu:
- d. Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena *ijarah* akad timbal balik, karena itu *ijarah* tidak sah dengan *upah* yang belum diketahui.
- e. Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- f. Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.

Syarat-syarat diatas harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan *upah-mengupah* agar tidak ada kesalahan dalam bertransaksi. Rasulullah bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باغ حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره

Artinya: Abu Hurairah berkata bahwa Rasul bersabda firman Allah: ada tiga musuh Saya di hari kiamat, 1. Orang yang berjaji pada-Ku kemudian ia melanggar, 2. Orang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya, 3. Orang yang memperkerjakan orang lain yang diminta menyelesaikan tugasnya, lalu ia tidak membayar *upahnya*.

Di *point* ketiga daam hadist diatas menunjukkan bahwa pentingnya membayar *upah* yang sudah disepakati antara *musta'jir* dan *mu'jir*. Maka penting sekali untuk diperhatikan sebelum melakukan transaksi *upah-mengupah* harus memenuhi syarat dan ketentuannya.

Terdapat manfaat dimana jika barang yang menjadi akad dalam hal tersebut harus diketahui kegunaannya. Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang. Semua harta benda boleh diakadkan *ijarah* di atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- b) Objek *ijarah* dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- c) Objek *ijarah* dan manfaatnya tidak bertentangan dengan Hukum Syara. Misalnya menyewakan VCD porno dan menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat tidak sah.

- d) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon mangga untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya ataupun susunya.

Harta benda yang menjadi objek *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat *isty'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *ishlilakhi* adalah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijarah* di atasnya.²⁴

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka sistem pengupahan ini hukumnya *mubah* atau diperbolehkan dalam syari'at karena akan bermanfaat bagi yang membutuhkan. Sistem pengupahan ini harus didasarkan dengan kesepakatan antara *musta'jir* dan *mu'jir* dengan *upah* yang jelas, layak, dan dengan cara yang adil dalam artian tidak ada seorang pun yang akan dirugikan dalam hal ini.

Daftar Pustaka

- Al-Hifnawi, Muhammad Ibrahim, *Kitab Tafsir Al-Qurthubi*.
Ath-Thabari, Ibnu Jarir, *Tafsir Ath-Thabari*, penerjemah: Ahmaf Abdurroziq Al-Bakrie, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam.
Az-Zuhaili, Wahbah. 2013. *Tafsir Al-Munir*, penerjemah: Adbul Hayyi Al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani.
Caniago, Fauzi, "Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam", <https://media.neliti.com>
Effendi, Rustam, *Produksi Dalam Islam*, Yogyakarta: Magistra Insani Press.
Ghufron, Muhammad, "Politik Negara dalam Pengupahan Buruh di Indonesia", Jurnal Hukum dan Perundangan Islam.
Ibnu Katsir, Ismail, *Tafsir Ibnu Katsir*, penerjemah: M. Abdul Ghofar, dkk, Bogor: Pustaka Imam Syafi'I, 2003.
Karim, Adiwarman A., *Ekonomi Mikro Islam Edisi Ketiga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
Lestari, Dewi, *Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, Skripsi Prodi Ekonomi Islam UIN Walisongo, Semarang 2015.
Mulyadi, Syndiyatul, *Analisis Sistem Pengupahan Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ilmiah, <https://jimfeb.ub.ac.id>
Rahman, Aflazur, *Doktrin Ekonomi Islam*.
Riadi, Muchlisin, *Ijarah*, <https://www.kajianpustaka.com/>

²⁴ Muchlisin Riadi, *Ijarah*. <https://www.kajianpustaka.com/>